

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Long life education adalah motto yang digunakan oleh orang yang berilmu. Hal ini dapat diartikan bahwa selama kita hidup ilmu itu harus dicari, ilmu tidak datang sendiri tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh seseorang itu agar mendapatkan ilmu yang berguna bagi dirinya sendiri. Ilmu adalah kebutuhan yang ada dalam setiap individu atau adalah sesuatu yang hendak dicapai.

Pendidikan menurut Poerbakawatja dan Harahap dalam Muhibbin Syah, ialah usaha sengaja mendewasakan anak agar memiliki tanggung jawab moral atas segala perbuatannya.¹ Pendidikan mengarahkan perkembangan manusia menuju kearah yang lebih baik, bahwa pendidikan adalah upaya mengarahkan perkembangan kepribadian (aspek psikilogik dan psikofisik) manusia sesuai dengan hakekatnya agar menjadi insan kamil, dalam rangka mencapai tujuan akhir kehidupannya.²

Para peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita mereka. Sementara orang tua menaruh harapan pada sekolah untuk dapat mendidik anak agar menjadi orang pintar, terampil, dan berakhlak mulia. Apa yang diharapkan dari

¹Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 11.

²Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 97.

pendidikan untuk perkembangan peserta didik, setiap negara atau bangsa memiliki orientasi dan tujuan yang relatif berbeda. Bagi bangsa Indonesia, kontribusi pendidikan yang diharapkan bagi perkembangan para peserta didik termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No.20/2003).³

Menurut Undang-Undang tersebut pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diriny, masyarakat bangsa dan negara.

Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut menunjukkan karakter pribadi peserta didik yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan. Undang-Undang ini memberikan sebuah keharusan terhadap semua penyelenggara pendidikan, baik formal, non formal, maupun informal agar senantiasa mengorientasikan programnya untuk membangun karakter

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP. RI Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 6.

peserta didik yang mempunyai ciri-ciri pribadi seperti tercantum dalam tujuan tersebut.

Pendidikan yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi yaitu bidang administratif dan kepemimpinan (pengelolaan program-program sekolah), bidang instruksional dan kurikuler (pengajaran) dan bidang pembinaan siswa (bimbingan dan konseling) merupakan pendidikan yang bermutu.⁴

Kedudukan bimbingan dan konseling sebagai pelayanan dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah yaitu sebagai salah satu upaya pembinaan pribadi peserta didik dalam rangka upaya agar peserta didik dapat menemukan diri, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.⁵

Adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan berfungsi membantu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Guru dan guru BK sebagai pendidik, yang menjadi tokoh panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru perlu memiliki standar kualitas pribadi bagi anak didiknya agar dapat menjadi suri teladan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 konselor adalah pendidik. Profesi konselor sejajar dengan guru, dosen, pamong belajar,

⁴Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 4.

⁵Hallen A., *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 36.

tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur sebagai pendidik profesional.⁶

Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administrasi dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan, mungkin hanya menghasilkan siswa yang pintar dalam aspek akademik tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian.⁷ Maksudnya bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai kematangan untuk memahami dirinya dan orang lain, tanpa wawasan moral dan kemampuan berpikir secara terpadu sehingga dia dapat menyelesaikan masa pendidikan umum secara formal.

Untuk dapat menerapkan hasil pendidikan yang berkelanjutan dalam kehidupan anak didik, maka anak didik perlu memiliki wawasan tentang aplikasi psikologis terutama bimbingan konseling. Atas dasar itu maka dalam implementasinya jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi pengembangan potensi siswa yang meliputi aspek pribadi, sosial, akademik dan karir atau terkait dengan pengembangan pribadi siswa sebagai makhluk yang berdimensi biologis, psikologis, intelektual, emosi, sosial dan spiritual atau kesadaran beragama.

Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah identik dengan pendidikan sehingga sekolah tidak perlu

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP. RI Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar*, h. 6.

⁷Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, h. 4 .

lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. Keidentikan BK dengan pendidikan menyebabkan terdapatnya sekolah yang menjadikan guru mata pelajaran sebagai pengambil alih tugas guru BK yang notabene tidak memiliki keprofesionalan dalam bidang BK.

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyerahkan segala sesuatu (pekerjaan) kepada ahlinya. Perintah ini diisyaratkan dalam Q.S. an-Nisaa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Di tengah tantangan mendidik siswa di sekolah, keberadaan dan layanan BK di sekolah tentu saja perlu mendapatkan perhatian. Optimalisasi layanan BK di sekolah perlu dilakukan dengan kehadiran guru BK yang mampu menunjukkan unjuk kerja secara profesional. Bagaimana pun, siswa tak sekadar mendapatkan materi pelajaran di sekolah. Layanan bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan karir maupun bimbingan lainnya harapannya bisa berjalan baik.

Sumber daya manusia yang handal tidak lepas dari pengaruh pola kepemimpinan yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mengandung unsur mempengaruhi, adanya kerjasama dan mengarah pada suatu hal dan tujuan utama dalam sebuah

organisasi.⁸ Kepemimpinan berperan sebagai penggerak segala sumber daya manusia dan sumber daya lain yang termasuk dalam organisasi.

Sekolah adalah sebuah organisasi formal, dengan pemimpinnya seorang kepala sekolah. Di sekolah terdapat usaha-usaha administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran nasional, termasuk bimbingan dan konseling yang merupakan sub organisasi dari organisasi sekolah.⁹ Keberhasilan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan para petugas bimbingan dan konseling, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor.

Kepala sekolah sebagai administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, salah satunya layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu

⁸Andang, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), h. 38.

⁹Ridwan, *Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 8.

mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolahnya.¹⁰

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin adalah salah satu sekolah swasta yang ada di Banjarmasin, dimana di dalamnya terdapat 80 orang siswa dan tidak memiliki guru BK bahkan pelaksanaan BK pun terlihat tidak berjalan secara terprogram. Berdasarkan peninjauan awal selama peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II) terdapat banyak siswa yang memiliki permasalahan pelanggaran tata tertib seperti banyak siswa yang terlambat, sering keluar masuk pada saat jam pelajaran, memainkan *handphone* pada saat jam pelajaran, berpakaian yang tidak rapi, memakai sandal dan lain-lain. Penyelesaian terhadap masalah yang terjadi kebanyakan hanya melalui teguran, dicatat dalam buku piket pengawas harian lalu diberi sanksi seperti membersihkan teras sekolah atau kantor guru.

Penyelesaian atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa bisa dibilang tidak memiliki efek sadar dan pelanggaran-pelanggaran masih terjadi lagi. Melihat kenyataan di lapangan peneliti berpikir bahwa di sekolah ini perlu menjalankan dan menerapkan BK. Sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena adanya masalah, jika tidak ada maka BK tidak diperlukan, dan BK itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja.

¹⁰Andang, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, h. 57-60.

Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas utama bimbingan dan konseling adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya peranan BK itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar.

Mengingat pentingnya keberadaan guru BK di sekolah, dan keberadaan guru BK merupakan salah satu tugas kepala sekolah dalam memfasilitasi program bimbingan dan konseling. Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Upaya Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Keberadaan Guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dikemukakan pokok masalah yang perlu diungkap dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mewujudkan keberadaan BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin?
2. Bagaimana keadaan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui bagaimana upaya kepala sekolah dalam mewujudkan keberadaan guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin.
2. Mengetahui keadaan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang upaya kepala sekolah dalam mewujudkan keberadaan guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin.
- b. Sebagai sumbangan data ilmiah dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, sekolah, kepala sekolah, siswa dan penulis diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari

Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (khususnya). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Bagi Sekolah

Sebagai acuan untuk memperhatikan keberadaan guru BK di sekolah.

c. Bagi Kepala Sekolah

Untuk kepala sekolah hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi mengenai peran dan tanggung jawabnya terhadap keberadaan guru BK.

d. Bagi Siswa

Agar mengenal dan mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling yang layak.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi kesalahpahaman serta meluasnya pembahasan akan diberikan batasan istilah:

1. Upaya mengandung makna “usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar”.¹¹ Adapun upaya yang dimaksud penulis adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam mewujudkan keberadaan guru bimbingan dan konseling.
2. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh,¹² termasuk didalamnya penyelenggaraan bimbingan dan konseling disatuan pendidikan masing-masing. Kepala sekolah yang dimaksud yaitu kepala MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin.
3. Guru BK: guru BK adalah konselor yang bertanggung jawab terhadap sejumlah peserta didik dalam kegiatan bimbingan dan konseling.¹³

Jadi, maksud judul di atas adalah tentang upaya kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap keberadaan guru BK di sekolah yang ia pimpin. Sehingga keberadaan guru BK di MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin dapat diwujudkan.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 383.

¹²Andang, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, h.54.

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No. 03/V/PB/2010, No. 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya* (Jakarta, 2010), h. 5 [PDF]

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: pembahasan tentang kepala sekolah dan tentang bimbingan dan konseling di sekolah.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Bagian terakhir dari skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.